

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Sukirno (2016:33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan pembangunan suatu negara. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan sasaran utama bagi negara-negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik bagi penduduknya. Selain itu dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Indonesia sebagai negara yang berkembang terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengejar ketinggalan dengan negara lain.

Pembangunan merupakan salah satu hal umum yang bisa dilihat pada saat ini di hampir semua daerah dan kota yang ada di Indonesia. Adanya pembangunan di setiap lokasi tersebut, masyarakat juga bisa menikmati kesetaraan dalam aspek sosial maupun dalam aspek ekonomi,

baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Konsep pembangunan ideal dari setiap lokasi di Indonesia tentu saja mengharuskan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat 1 (satu) dan tingkat II (dua) untuk melakukan penganggaran sejumlah dana untuk menunjang atau bahkan meningkatkan standar mutu dari fasilitas-fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pembangunan ekonomi wilayah kabupaten/kota ialah awal dari pelaksanaan pembangunan, supaya daerah bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan wilayahnya. Menurut Blakely dalam (Walelongko,2017) pembangunan ekonomi wilayah yaitu proses pemerintah dan semua komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki dan membentuk kerjasama untuk membuat lapangan kerja baru dan merangsang aktivitas ekonomi wilayah.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi.

Desentralisasi atau otomomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur berkaitan dengan rumah tangganya. Hal ini menuntun pemerintah wilayah agar bijak dalam memungut pajak dan retribusi di wilayah masing-masing. Selain itu pemerintah juga dituntut agar mampu mengalokasikan hasil pajak yang diterima sampai kepada penciptaan masyarakat yang adil, makmur, dan merata seperti Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat menentukan ialah pajak, penerimaan pajak menyumbang pendapatan yang cukup besar, sehingga fungsi pajak cukup sentral. Disini perlu perhatian lebih dari pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah sekarang sedang memperbaiki sistem pemungutan pajak disebabkan sistem lama masih memiliki kelemahan-kelemahan, perbaikan perlu dilaksanakan agar pendapatan negara dari sektor pajak tidak bocor, serta meningkatkan dimasa yang akan datang (Sunarto & Sunyoto, 2016).

Pajak ialah sumber penerimaan yang dipakai oleh pemerintah untuk pembiayaan dalam menggerakkan roda pemerintah. Diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi dalam mengelola wilayah itu sendiri seperti yang tercantum dalam kebijakan yang otonomi daerah.

Otonomi daerah di Indonesia diberlakukan pada tanggal 01 Januari 2001, dimana otonomi daerah mempercepat pemerintah berkreasi dan memutar otak mencari pendapatan wilayah agar mampu membiayai pengeluaran, serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Kresnandra & Ni Made, 2013).

Selain bersumber dari pajak daerah, pertumbuhan ekonomi juga dapat bersumber dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan kesetaraan dinamika dari menambah dan mengurangi jumlah penduduk, penambahan penduduk dikarenakan angka kelahiran dan pengurangan penduduk karena adanya kematian penduduk atau migrasi (Rochaida, 2016).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 2010). Kata “perkapita” menunjukkan ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total-nya (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Proses kenaikan output perkapita,

harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total disatu pihak, dan dan jumlah penduduk dipihak lain. Sehingga menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi pada jumlah penduduk. Oleh karena itu, posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi sendiri selalu terkait dengan jumlah penduduk.

Menurut pernyataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk ialah seluruh orang atau penduduk atau masyarakat yang bertempat tinggal disebuah wilayah geografis Republik Indonesia berkisar kurang lebih 6 bulan yang bertujuan untuk menetap. Menurut (Sukirno, 2013) penambahan penduduk yang signifikan dapat mendorong ataupun menghambat perkembangan perekonomian. Penduduk yang meningkat akan menambah dan memperbesar jumlah tenaga kerja yang berakibat pada penambahan produksi seta dapat memperluas jaringan pasar. Pernyataan dalam Teori Malthus juga memperkuat dengan mengatakan perkembangan ekonomi dapat dilihat dari adanya pertumbuhan jumlah penduduk, untuk itu setiap peningkatan yang terjadi pada penambahan jumlah penduduk dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) N0. 22 Tahun 1999 diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (PEMDA) dikarenakan memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien (Firly, 2013).

Otonomi daerah dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang diharapkan dari pemerintah daerah untuk terlaksananya pembangunan daerah adalah

fasilitas, pemerintah harus kreatif, politik lokal yang stabil, jaminan kesinambungan berusaha, komunikatif, yang utama bagi pembangunan daerah adalah penciptaan lapangan kerja. Dengan penciptaan lapangan kerja yang tinggi maka daya beli akan meningkat dan pada akhirnya akan mempengaruhi pajak. Jika daya beli meningkat, pajak yang dihasilkan meningkat, maka juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah.(Syaukani, 2011).

Setelah diperlakukannya otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan mencerminkan otonomi daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah (Halim, 2010)

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan pemerataan ekonomi (*economic stability*) melalui retribusi pendapatan (*income redistribution*) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pendapatan asli daerah berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam pembiayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Peranan PAD semakin tinggi dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Memah:2013). Dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan (Dotulong Dkk: 2014).

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah terbesar ialah pajak daerah. Pajak daerah mempunyai kontribusi besar dalam penerimaan PAD yang dimana menjadi penerimaan yang akan bisa pemerintah lakukan pembangunan daerah. Apalagi pemerintah daerah Provinsi Aceh sedang gencar dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Yang dimana penerimaan Pajak Daerah menjadi suatu kontribusi pendapatan asli daerah.

Berikut tabel 1.1 Perkembangan Pajak Daerah Provinsi Aceh Tahun 2000-2021:

Tabel 1.1
Perkembangan Pajak Daerah Di Provinsi Aceh Tahun 2000-2021

No	Tahun	Pajak Daerah (Rp)
1.	2000	29.567.983
2.	2001	43.355.907.201
3.	2002	72.734.461.831
4.	2003	86.899.680.968
5.	2004	340.505.705.335
6.	2005	455.352.555.276
7.	2006	309.612.956.242
8.	2007	411.482.682.733
9.	2008	464.317.354.502
10.	2009	268.453.009.839

11.	2010	521.326.412.818
12.	2011	586.181.445.846
13.	2012	687.476.816.747
14.	2013	752.846.745.436
15.	2014	1.030.679.175.160
16.	2015	1.172.685.149.787
17.	2016	1.252.745.084.804
18.	2017	1.315.393.895.060
19.	2018	1.309.081.813.533
20.	2019	1.509.791.063.999
21.	2020	1.591.330.347.941
22.	2021	1.374,560,099.794

Sumber: BPS Aceh, 2024

Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Aceh sejak tahun 2000- 2021, pada tahun 2000 sampai tahun 2006 Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp 455.352.555.276 milyar yang dimana hal ini disebabkan dua tahun berlalunya tsunami yang mengakibatkan usaha yang dijalankan di Aceh berkurang sehingga pajak yang dikenakan juga sedikit. Pada tahun 2007 mengalami peningkatan yakni sebesar Rp 309.612.956.242 milyar, dimana masyarakat sudah mulai bangkit menjalani usahanya dan masyarakat juga bertambah.

Pada tahun 2008 perkembangan Pajak Daerah Provinsi Aceh bisa dikatakan cukup yakni sebesar Rp 464.317.354.502 milyar dimana pemerintah Aceh memulai penerapan pajak secara tegas kepada penduduk. Pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar Rp 268.453.009.839 milyar, hal ini sebabkan karena menurunnya pajak hiburan dan pajak hotel karena wisatawan yang mendatangi Provinsi Aceh berkurang. Lalu ditahun selanjutnya yaitu pada tahun 2010 mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar Rp 521.326.412.818 milyar, yang dimana Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan Pajak Daerah secara baik dengan mengembangkan wisata yang ada di kota maupun dikabupaten. Di tahun selanjutnya tahun 2011 mengalami penurunan sedikit sebesar Rp 586.181.445.846 milyar. Meskipun begitu ditahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup bagus yaitu sebesar Rp 687.476.816.747 milyar .

Di tahun 2013 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar Rp 752.846.745.436 milyar dikarenakan sarana dan prasarana kurang mumpuni meskipun begitu, peningkatan tertinggi ada pada tahun 2014 yaitu mencapai Rp 1.030,679.175.160 triliun. Hal ini disebabkan karena penambahan program kegiatan prioritas untuk menunjang pencapaian visi dan misi daerah pemerintah Provinsi Aceh.

Pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 1.172.685.149.787 triliun. Hal ini dikarenakan pada saat itu Pemerintah Provinsi Aceh memberikan Pemutihan Pajak Atas Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor. Wajib Pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor hanya diwajibkan membayar pajak pada tahun berjalan yakni 2015. Dan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 Pajak Daerah mengalami penurunan, yang dimana titik penurunan terendah sebesar Rp 1.309.081.813.533 triliun.

Hal ini disebabkan karena menurunnya tarif pajak bahan bakar yang berlaku pada belakangan ini. Karena semakin banyak orang yang membeli kendaraan bermotor semakin banyak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotornya dengan alasan pajaknya mahal. Lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.509.791.063.999 triliun. Hal ini dikarenakan pemerintah menargetkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) 2019 pada Sektor Pajak.

Namun sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami penurunan yang dimana titik penurunan terendah sebesar Rp 1.374.560.099.794 triliun hal ini disebabkan karena menurunnya tarif pajak bahan bakar yang berlaku pada belakangan ini. Karena semakin banyak orang yang membeli kendaraan bermotornya semakin banyak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotornya dengan alasan pajaknya mahal .

Pajak Daerah memiliki fungsi yang penting yang dimana fungsi tersebut diukur berdasarkan target capai pungutan pajak daerah. Dan apabila pencapaiannya tinggi maka fungsi

pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah akan tinggi yang dimana fungsi tersebut sebagai pendapatan daerah, pengatur ekonomi daerah, sarana stabilitas ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Di Provinsi Aceh
Tahun 2000-2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2000	3.929.234,00
2.	2001	4.114.000,00
3.	2002	4.166.040,00
4.	2003	4.218.486,00
5.	2004	4.075.599,00
6.	2005	4.031.589,00
7.	2006	4.153.573,00
8.	2007	4.233.833,00
9.	2008	4.293.915,00
10.	2009	4.363.477,00
11.	2010	4.523.144,00
12.	2011	4.619.033,00
13.	2012	4.715.108,00
14.	2013	4.811.133,00
15.	2014	4.906.835,00
16.	2015	5.001.953,00
17.	2016	5.096.248,00
18.	2017	5.189.466,00
19.	2018	5.281.314,00
20.	2019	5.371.532,00
21.	2020	5.274.871,00
22.	2021	5.333.733,00

Sumber : BPS Aceh, 2024

Menurut Tabel 2 kenaikan jumlah penduduk terjadi setiap tahunnya di Provinsi Aceh. Pada tahun 2000 jumlah penduduk provinsi Aceh adalah 4 juta jiwa hingga tahun 2021 jumlah penduduk di provinsi Aceh mencapai 5,3 juta jiwa jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya di Provinsi Aceh penduduk juga di harapkan dapat membantu aktivitas ekonomi dan memajukan ekonomi dalam upaya kemajuan teknologi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.

Jumlah penduduk menjadi faktor terpenting dalam penerimaan pajak daerah yang dimana perkembangan Jumlah Penduduk dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka akan berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga nantinya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk dan penerimaan pajak daerah akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi (Saputra, Sidjana:2014).

Banyaknya jumlah penduduk yang dioptimalkan diharap dapat mewujudkan tujuan pemerintah daerah dalam melakukan otonomi daerah dan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Teori pendapatan menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Menurut Samuelson dalam Simanjuntak (2011) pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial, atau asuransi pengangguran . Jumlah Penduduk merupakan satu indikator penting dalam suatu Negara.

Tabel 1.3
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh
Tahun 2000-2021

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Rp)
1.	2000	6.099.434,33
2.	2001	6.193.905,95
3.	2002	6.389.611,24
4.	2003	6.412.214,69
5.	2004	6.589.643,75
6.	2005	6.732.254,31
7.	2006	6.957.814,21
8.	2007	110.379.801,36
9.	2008	104.558.794,47
10.	2009	98.883.556,3
11.	2010	101.545.236,8
12.	2011	104.874.211,2
13.	2012	108.914.897,6
14.	2013	111.755.826,6
15.	2014	113.490.359,3
16.	2015	112.665.532,3
17.	2016	116.374.299,89
18.	2017	121.240.978,72
19.	2018	126.824.491,42
20.	2019	132.087.460,00
21.	2020	135.251.193,84
22.	2021	140.947.643,60

Sumber : BPS Aceh, 2024

Tabel 1.3 menunjukkan perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) Provinsi Aceh selama tahun 2000-2021. Pada tahun 2000 sampai tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sebesar Rp 6.732.254,31 juta. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 6.957.814,21 juta dengan stabilnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Pada tahun 2007 meningkat sebesar Rp 110.379.801,36 juta dikarenakan adanya laju inflasi yang dimana harga kebutuhan di Aceh meroket. Pada tahun 2008 sampai tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar Rp 98.883.556,3 juta hal ini disebabkan karena laju inflasi belum sepenuhnya stabil.

Pada tahun 2010 sampai 2021 mengalami peningkatan yang sangat drastic sebesar Rp140.947.643,60 juta dimana pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mengalami peningkatan dan stabil dengan memaksimalkan sumber daya manusia, tingginya daya beli masyarakat dan halini karena dengan banyaknya penduduk maka semakin banyak kegiatan produksi barang dan jasa dalam ekonomi masyarakat dan pemerintah sudah mulai mengoptimalkan sektor nonmigas serta produksi migas dan pertambangan mulai membaik kembali.

Laju Pertumbuhan Ekonomi di daerah dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang akan bersangkutan terhadap tahun sebelumnya yang merupakan indikator makro untuk melihat perekonomian secara rill di suatu wilayah. Penerimaan sumber pendapatan asli daerah menopang seluruh aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat menjadi program pemerintah daerah dalam upaya peningkatan dan kemajuan dalam mensejahterkan masyarakat yang semakin bertambah tinggi. Untuk melihat Pertumbuhan Ekonomi di suatu wilayah maka kenaikan PDRB dijadikan sebagai acuan tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk.

Dari penjelasan di atas diketahui pajak daerah dan jumlah penduduk yaitu komponen penting pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah dan jumlah penduduk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik secara positif ataupun negatif. Penulis juga menulis data pertumbuhan ekonomi, pajak daerah dan jumlah penduduk didapatkan dari beberapa instant pemerintah ialah badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertumbuhan ekonomi dilihat pada tahun 2000 sampai tahun 2021 juga terjadi fluktuasi yang masih dalam keadaan stabil.

Dan berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas cukup menarik untuk diteliti, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang mengambil judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang akan menjadi tujuan penelitian dalam penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Berapa Besar Pajak Daerah Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh pada tahun 2000-2021 ?
2. Berapa Besar Jumlah Penduduk Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh pada tahun 2000-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh pada tahun 2000-2021.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh pada tahun 2000-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk peneliti diharap penelitian ini bisa mendapatkan wawasan pengalaman serta dapat memperluas pengetahuan peneliti di bidang ekonomi khususnya mengenai Pajak Daerah , Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Sebagai informasi bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Ekonomi Pembangunan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut lagi.
3. Sebagai informasi untuk pembaca lainnya untuk mengetahui bagaimana perkembangan Pajak Daerah, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk pemerintah di Provinsi Aceh diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan untuk pemerintah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk mengurangi indeks kedalaman kemiskinan, Peningkatan kualitas, indeks pembangunan manusia, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Aceh.
2. Bagi peneliti , sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan untuk memperoleh gambaran mengenai Pajak Daerah dan Jumlah Penduduk serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.